

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DALAM  
PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DI KOTA  
JAMBI**

Sri Nurtati Ritonga<sup>1</sup>, Alif Aditya Candra<sup>2</sup>, Siti Tiara Maulia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> PPKn FKIP, Universitas Jambi

[srinurtatiritonga21@gmail.com](mailto:srinurtatiritonga21@gmail.com)<sup>1</sup>, [alifaditya@unja.ac.id](mailto:alifaditya@unja.ac.id)<sup>2</sup>, [sititiaramaulia@unja.ac.id](mailto:sititiaramaulia@unja.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The right to education is a constitutional right guaranteed by Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, its implementation still faces various obstacles, such as poverty and high school dropout rates, including in Jambi City. This study aims to analyze the implementation of the "Sekolah Rakyat" (People's School) Program in fulfilling the right to education in Jambi City. The research employs a qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results indicate that the Sekolah Rakyat Program plays a vital role in providing educational access for underprivileged children through a free, dormitory-based education system. Nevertheless, its execution still encounters challenges, such as limited resources and program reach. Consequently, the Sekolah Rakyat Program serves as a strategic alternative in supporting educational equality, though it still requires optimization in its implementation.*

**Keywords:** Policy Implementation, Sekolah Rakyat, Right to Education

**ABSTRAK**

Hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kemiskinan dan tingginya angka putus sekolah, termasuk di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sekolah Rakyat dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sekolah Rakyat berperan penting dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu melalui sistem pendidikan gratis dan berbasis asrama. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan jangkauan program. Dengan demikian, Program Sekolah Rakyat menjadi alternatif strategis dalam mendukung pemerataan pendidikan, meskipun masih memerlukan optimalisasi pelaksanaan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Sekolah Rakyat, Hak Atas Pendidikan,

**A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting bagi kemajuan dan pembangunan suatu bangsa,

termasuk Indonesia. Pendidikan dipandang sebagai investasi strategis dalam sumber daya manusia dan bertindak sebagai motor ekonomi.

Oleh karena itu, implementasi pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap negara. Pendidikan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan tatanan sosial. Dengan memperoleh pendidikan, individu dapat meningkatkan kompetensi, mengembangkan potensi dan bakat, mengasah keterampilan, memperoleh pengetahuan baru, serta memahami prinsip-prinsip dasar yang diperlukan untuk interaksi sosial (Hidayat, 2022).

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas dalam Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Lebih lanjut ayat (3) menyebutkan bahwa: "Pemerintah berupaya menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, saat ini hak atas pendidikan hampir secara universal diakui

sebagai hak yang harus dipenuhi (Palguna, 2023).

Tanpa pendidikan, perkembangan manusia akan terhambat dan kehidupan cenderung berjalan tanpa kemajuan. Kondisi tersebut bahkan dapat menyebabkan kemunduran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah kebutuhan yang mendasar dan harus ada dalam kehidupan manusia (Kumala et al. 2023).

Meskipun UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan hak pendidikan, pada kenyataannya, pelaksanaan amanat ini belum tercapai sepenuhnya. Pemerintah telah berupaya melalui berbagai program dan kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, namun kesenjangan dalam sektor pendidikan tetap menjadi masalah yang rumit dan mendalam. Faktor utama yang menghambat pemerataan pendidikan di Indonesia adalah ketidakmerataan kondisi ekonomi masyarakat antarwilayah. Kesenjangan ekonomi yang mencolok antara daerah perkotaan yang maju dengan wilayah pedesaan atau terpencil yang tertinggal menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin kesulitan

mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Septiana,2024).

Biaya pendidikan yang mahal bagi sebagian besar keluarga berpenghasilan rendah, ditambah dengan kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak, sering memaksa anak-anak kurang mampu untuk mengorbankan sekolah demi bekerja membantu keuangan rumah tangga. Akibatnya, pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk memutus rantai kemiskinan, justru semakin tidak terjangkau oleh kelompok yang paling membutuhkannya. Kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan yang sulit diakhiri tanpa adanya intervensi kebijakan yang tepat, merata, dan berbasis keadilan sosial.

Berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 Tentang Jumlah Anak Yang Tidak Bersekolah di Indonesia memberikan persentase pada tingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, angka anak putus sekolah masih sangat rendah, hanya 0,68% pada laki-laki dan 0,66% pada perempuan, dengan total nasional sebesar 0,677%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar sudah

mempunyai akses terhadap pendidikan, dan tidak terdapat kesenjangan gender yang signifikan pada tingkat ini, namun ketika memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, jumlah anak putus sekolah meningkat tajam, yaitu mencapai 7,97% untuk laki-laki, 5,86% untuk perempuan, dan secara nasional sebesar 6,93%. Peningkatan drastis ini menunjukkan bahwa peralihan dari SD ke SMP merupakan titik yang sangat rentan bagi anak putus sekolah, dimana persentase anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan.

Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, jumlah anak yang tidak bersekolah mencapai titik tertinggi, yakni 23,78% laki-laki, 19,78% perempuan, dan secara nasional sebesar 21,61%. Angka tersebut berarti lebih dari satu dari lima remaja usia sekolah menengah atas tidak melanjutkan pendidikan. Secara keseluruhan, pola data nasional secara konsisten menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula persentase anak yang tidak bersekolah. Selain itu, kesenjangan antara anak laki-laki dan perempuan semakin terlihat jelas di tingkat

pendidikan tinggi, yang menunjukkan bahwa kesetaraan akses terhadap pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, khususnya di tingkat sekolah menengah dan atas.

Selanjutnya, Menurut Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek pada tahun 2023, jumlah siswa putus sekolah di Indonesia masih tinggi di semua jenjang. Data menunjukkan angka putus sekolah masih cukup tinggi dan tersebar di semua jenjang pendidikan, meski dengan jumlah yang bervariasi. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD), jumlah anak putus sekolah mencapai 45.047 anak, menjadikannya kelompok terbesar. Hal ini menandakan bahwa isu putus sekolah sudah muncul sejak pendidikan dasar. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah anak putus sekolah mengalami penurunan menjadi 17.324 anak, namun angka tersebut masih signifikan dan menunjukkan bahwa masa transisi dari SD ke SMP masih merupakan fase yang rentan terhadap risiko putus sekolah. Di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), jumlah anak putus sekolah bahkan lebih rendah yakni sebanyak 9.657 anak, namun angka

tersebut kembali meningkat di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 13.918 anak. Di Sekolah Luar Biasa (SLB), jumlah anak putus sekolah tercatat sebanyak 790 anak, angka yang lebih kecil karena populasi siswa di SLB juga jauh lebih kecil, namun tetap penting untuk diwaspadai karena kelompok ini merupakan kelompok rentan yang memerlukan layanan pendidikan khusus.

Secara keseluruhan, total anak putus sekolah secara nasional pada tahun 2023 mencapai 86.736 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak putus sekolah masih menjadi tantangan besar dalam menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga memerlukan perhatian serius melalui intervensi kebijakan, bantuan ekonomi, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh daerah.

Kemudian, berdasarkan Data Kemendikdasmen terlihat bahwa persoalan anak tidak bersekolah di Kota Jambi masih menjadi masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas pendidikan yang

dijamin oleh konstitusi belum sepenuhnya terpenuhi, terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Untuk merespons berbagai kendala pendidikan, terutama tingginya angka anak yang tidak bersekolah dan terbatasnya akses pendidikan formal, pemerintah atas inisiasi Prabowo Subianto dan masyarakat berkolaborasi meluncurkan Program Sekolah Rakyat (Ananda, 2025).

Program ini merupakan inovasi pendidikan yang dirancang agar lebih inklusif dan berkeadilan. Inisiatif ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk menyediakan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghilangkan hambatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, geografis, maupun administratif. Secara umum, penerapan Sekolah Rakyat di Indonesia dilaksanakan dengan semangat pendidikan berbasis komunitas (*community-based education*), di mana masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kota Jambi adalah salah satu daerah yang telah melaksanakan program ini, menjadikan Sekolah

Rakyat sebagai bukti nyata upaya pemerintah daerah untuk memenuhi hak pendidikan sesuai jaminan Pasal 31 UUD 1945 dan berkontribusi langsung terhadap pemerataan kesempatan belajar di seluruh Indonesia (Sumarno, 2025). Melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan relawan pendidikan, Sekolah Rakyat di Kota Jambi memiliki peran krusial dalam menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak yang tidak bersekolah, sekaligus berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar turut aktif mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penerapan Sekolah Rakyat di Kota Jambi menjadi bukti nyata dari usaha pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Kota Jambi menghadapi tantangan signifikan di sektor pendidikan, dengan catatan 2.210 anak yang masih belum mendapatkan kesempatan belajar yang semestinya. Sekolah Rakyat ini tidak hanya fokus pada pendidikan, namun juga terintegrasi dengan berbagai layanan sosial lainnya, antara lain program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan kesehatan bagi

siswa dan seluruh anggota keluarganya (Eko Budiono, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rudi Hartono, S.Pd selaku Wali Asrama Wakil Kepala Sekolah di Sekolah Rakyat pada 29/10/2025, beliau menyampaikan bahwa: masih terdapat banyak sekali anak-anak yang belum dapat mengakses pendidikan di kota Jambi, banyak dari mereka yang tidak bersekolah dikarenakan berbagai hal, khususnya itu karena faktor ekonomi yang membuat mereka harus merelakan sekolah mereka. Namun dengan adanya program sekolah rakyat ini yang memiliki tujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Tiurisma Sinurat selaku Wali Asrama pada 29/10/2025, beliau mengatakan bahwasanya: sekolah rakyat ini dianggap menjadi salah satu cara untuk membantu anak-anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan sebagaimana mestinya agar bisa mendapatkan haknya kembali. Sejalan dengan hasil wawancara kepada salah seorang Tenaga

Pendidik di sekolah tersebut yaitu Bapak Alfazio, beliau menyampaikan: Program Sekolah Rakyat ini sangat bermanfaat bagi anak-anak untuk melanjutkan dan juga mendapatkan pendidikan seperti anak-anak pada umumnya yang sedang mengikuti pendidikan, beliau menyampaikan bahwa pendidikan di sekolah rakyat ini selain mereka diajari seperti pendidikan formal pada umumnya, mereka juga diajari berbagai hal seperti melatih kedisiplinan melalui kegiatan rutin dari pagi hingga sore hari, dilatih kemandirian dan juga tanggung jawab dalam setiap perbuatan dan juga tindakan mereka.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menyediakan solusi konkret agar setiap anak, tanpa terkendala kondisi sosial, ekonomi, atau administratif, tetap memiliki ruang untuk belajar dan maju, oleh karena itu Sekolah Rakyat di Kota Jambi tidak sekadar menjadi lembaga pendidikan alternatif, tetapi juga simbol sinergi antara negara dan rakyat dalam mencapai keadilan sosial di bidang pendidikan.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, penelitian mengenai implementasi Program Sekolah

Rakyat sebagai upaya pemenuhan hak atas pendidikan sesuai Pasal 31 UUD 1945 di Kota Jambi menjadi sangat penting dan relevan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Implementasi program ini dioperasikan di lapangan, serta apa faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan program ini di lapangan.

### **B. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam fenomena, peristiwa, dan aktivitas sosial sebagaimana adanya (Haki, 2024) mengenai bagaimana Implementasi Program Sekolah Rakyat di lapangan yaitu di Kota Jambi. Penelitian deskriptif, juga dikenal sebagai penelitian taksonomi, pada dasarnya adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk mengeksplorasi atau memperjelas suatu kondisi, fenomena, atau realitas sosial sebagaimana adanya. Pada hakikatnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal yang penting

untuk dipahami bahwa penelitian deskriptif tidak membahas hubungan antar variabel atau mencari penjelasan sebab-akibat. Tujuannya bukan untuk menarik generalisasi tentang mengapa suatu fenomena sosial terjadi. Sebaliknya, fokusnya adalah memberikan gambaran murni tentang keadaan objek yang diteliti di lapangan (Syahrizal and Jailani, 2023).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang pada akhirnya akan menguraikan data yang diperoleh ketika penelitian berlangsung. Beberapa tahap yang digunakan dalam penelitian ini seperti: reduksi data dengan menggunakan triangulasi teknik (observasi, wawancara, dan dokumentasi) menurut (Sugiyono, 2023) yang pada akhirnya akan diuraikan di bagian pembahasan dan hasil mengenai implementasi program Sekolah Rakyat dalam pemenuhan atas hak pendidikan serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Wawancara yang membahas implementasi program sekolah rakyat di Kota Jambi. menggunakan teori

dari (Zulkarmain 2021), yang memaparkan mengenai Indikator Mutu pendidikan yang terdiri dari: 1) Mutu Input Pendidikan, 2) Mutu Proses Pendidikan, 3) Mutu Output Pendidikan. Yang dijabarkan sebagai berikut:

**I. Implementasi Program Sekolah Rakyat dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan Berdasarkan pasal 31 UUD 1945 Negara Republik Indonesia di Kota Jambi.**

**a) Mutu Input Pendidikan**

Menurut (Zulkarmain, 2021) indikator mutu input pendidikan dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi dan digunakan untuk menilai tingkat kesiapan berbagai sumber daya pendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, yang meliputi kondisi siswa, kompetensi tenaga pengajar, kesesuaian kurikulum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan pendanaan. Sebab, keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program itu sendiri, namun juga oleh kesiapan dan kualitas sumber daya yang mendukung pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dr. S, S.Pd., M.Pd, pada tanggal 27 Februari,

2 Maret, dan 20 April 2026, serta pada tanggal 2 Maret dan 16 April 2026, peneliti bertanya mengenai “Bagaimana proses penentuan atau penerimaan peserta didik dalam Program Sekolah Rakyat di Kota Jambi, khususnya dalam menentukan siapa saja yang berhak mengikuti program tersebut?”. Beliau menjawab:

“Untuk informasi tersebut, berasal dari Dinas Sosial, karena Sekolah Rakyat ini berada di bawah Kementerian Sosial. Adapun siswa yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang telah didata oleh Dinas Sosial, dengan salah satu syarat berasal dari desil 1 dan desil 2, yaitu tingkatan ekonomi terendah di Indonesia.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu A F, S.Pd, Galang Pratama, Faza Fauzia, Pihak Dinas Sosial Kota Jambi yang menyebutkan bahwa proses penetapan dan penerimaan siswa pada Program Sekolah Rakyat di Kota Jambi dilakukan secara terarah dan berdasarkan data dari Dinas Sosial, dengan sasaran utama adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim (desil 1 dan desil 2).

### **b) Mutu Proses Pendidikan**

Indikator mutu proses pendidikan digunakan untuk menilai pelaksanaan pembelajaran pada Program Sekolah Rakyat, yang meliputi kualitas penyampaian materi, interaksi guru dan siswa, pengelolaan kelas, dan pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

Peneliti bertanya kepada Ibu A.F, S. Pd., G.r pada tanggal 27 Februari, 2 Maret, dan 20 April 2026, serta pada tanggal 2 Maret dan 16 April 2026, mengenai, "Bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam Program Sekolah Rakyat di Kota Jambi, khususnya dalam hal penyampaian materi pelajaran oleh guru, metode pembelajaran yang digunakan, serta bagaimana siswa mengikuti dan memahami materi yang diajarkan selama proses pembelajaran berlangsung. Beliau menjawab:

"Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sudah sangat memadai dan didukung fasilitas yang lengkap, sehingga memudahkan guru menyampaikan materi dengan jelas. Metode yang digunakan juga beragam, menyesuaikan

guru dan materi yang diajarkan.

Guru dan siswa sama-sama memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mendukung proses pembelajaran."

Sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Dr. S, S.Pd., M.Pd, Galang Pratama, Faza Fauzia, Pihak Dinas Sosial Kota Jambi yang menyebutkan bahwa mutu pembelajaran Program Sekolah Rakyat di Kota Jambi tergolong cukup baik. Pembelajaran dilaksanakan sesuai kurikulum dengan dukungan metode dan fasilitas yang memadai, serta didukung masa pembinaan awal yang membantu kesiapan dan kedisiplinan siswa. Pembelajaran juga secara bertahap meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan minat belajar.

### **c) Mutu Output Pendidikan**

Indikator Output Pendidikan digunakan untuk menilai tingkat pencapaian hasil belajar dan kompetensi peserta didik pada Program Sekolah Rakyat, yang meliputi prestasi akademik, keterampilan praktis, sikap dan karakter, serta kemampuan melanjutkan pendidikan atau mengikuti dunia kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. S, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah pada tanggal 27 Februari, 2 Maret, dan 20 April 2026, serta pada tanggal 2 Maret dan 16 April 2026, peneliti bertanya mengenai, “Menurut Anda, bagaimana perubahan kemampuan belajar siswa setelah mengikuti Program Sekolah Rakyat, misalnya dalam membaca, menulis, memahami pelajaran, atau pengetahuan yang mereka miliki dibandingkan sebelum mengikuti program ini? beliau mengatakan:

“Sebelum mengikuti Program Sekolah Rakyat, banyak siswa mengalami kesulitan dalam kemampuan dasar belajar. Setelah mengikuti program ini, terjadi peningkatan kemampuan, motivasi, dan semangat belajar siswa. Program ini berperan dalam membantu siswa mengejar ketertinggalan serta mengembangkan potensi mereka secara optimal.”

Sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu A F, S.Pd, Galang Pratama, Faza Fauzia, Pihak Dinas Sosial Kota Jambi yang menyebutkan bahwa program Sekolah Rakyat

memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Sebelum mengikuti program, siswa mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan memahami pelajaran akibat keterbatasan dukungan belajar dan kondisi ekonomi keluarga. Setelah mengikuti program, terjadi peningkatan kemampuan akademik, pengetahuan, serta motivasi belajar.

Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan mengenai kualitas keluaran pendidikan pada Program Sekolah Rakyat disimpulkan bahwa program ini menunjukkan hasil yang baik dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan siswa. Dari aspek hasil belajar, siswa mengalami peningkatan kemampuan dalam membaca, menulis, memahami pelajaran, serta menunjukkan motivasi dan minat belajar yang lebih baik. Program ini juga membantu siswa mengejar ketertinggalan karena perbedaan latar belakang pendidikan sebelumnya.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang memengaruhi Pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kota Jambi?**

### **a) Mutu Input Pendidikan**

Mengenai Mutu Input Pendidikan Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah pada tanggal 27 Februari, 2 Maret, dan 20 April 2026, dan 2 Maret dan 16 April 2026 mengenai "Menurut Bapak, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan mutu input pendidikan?, Kemudian kepala sekolah mengatakan:

"Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan mutu pendidikan. Faktor pendukungnya adalah program ini dibiayai pemerintah sehingga membantu siswa dari keluarga kurang mampu, hambatannya terletak pada sarana dan prasarana, terutama gedung sekolah yang belum memadai sehingga memengaruhi kenyamanan belajar."

Sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu A F, S.Pd, Galang Pratama, Faza Fauzia, dan Pihak Dinas Sosial Kota Jambi yang menyebutkan bahwa faktor pendukung utama adalah kebijakan pemerintah yang menanggung seluruh biaya pendidikan sehingga

membuka akses bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta kerja sama sekolah dan Dinas Sosial dalam rekrutmen langsung di lapangan serta faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana prasarana, terutama gedung yang masih dalam pembangunan, sehingga memengaruhi kenyamanan belajar dan juga perbedaan kesiapan siswa, kesulitan adaptasi terhadap lingkungan baru, serta keraguan sebagian orang tua juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

#### **b) Mutu Proses Pendidikan**

Mengenai Mutu Proses Pendidikan, peneliti bertanya kepada Guru pada tanggal 27 Februari, 2 Maret, dan 20 April 2026, serta tanggal 2 Maret dan 16 April 2026, mengenai, "Menurut Ibu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada Program Sekolah Rakyat di Kota Jambi?" beliau mengatakan:

"Kalau dari kami sebagai guru, faktor pendukung pembelajaran adalah sistem asrama yang membuat waktu belajar lebih terarah serta metode mengajar yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Sedangkan

penghambatnya adalah perbedaan kemampuan dasar siswa yang cukup jauh dan proses adaptasi terhadap aturan asrama, sehingga guru perlu memberikan pendampingan dan penyesuaian pembelajaran.”

Sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Dr. S, S.Pd., M.Pd., Galang Pratama, Faza Fauzia, dan Pihak Dinas Sosial Kota Jambi yang menyebutkan bahwa kualitas proses pendidikan pada Program Sekolah Rakyat di Kota Jambi didukung oleh kebijakan dan pendanaan pemerintah, kerja sama sekolah dengan Dinas Sosial, serta penerapan sistem asrama yang mendorong kedisiplinan siswa. Selain itu, komitmen guru dalam menyesuaikan pembelajaran turut menjadi faktor pendukung penting. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa proses adaptasi siswa dan orang tua terhadap sistem asrama, perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan sarana dan prasarana termasuk buku teks dan fasilitas ekstrakurikuler, serta beban belajar yang cukup padat.

### **c) Mutu Output Pendidikan**

Mengenai Mutu Output Pendidikan Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah pada tanggal 27 Februari, 2 Maret, dan 20 April 2026 mengenai, “Menurut Bapak, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat hasil belajar atau pencapaian siswa dalam Program Sekolah Rakyat di Kota Jambi?”, beliau mengatakan:

“Program ini memberikan dampak yang cukup baik, terutama bagi siswa yang sebelumnya tidak bersekolah kini dapat mengikuti pendidikan. Perubahan juga terlihat pada sikap dan kedisiplinan siswa melalui sistem berasrama. Namun, hasil belajar belum sepenuhnya merata karena perbedaan kemampuan awal siswa, sehingga masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut dan waktu untuk mencapai hasil yang optimal.”

Sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu A F, S.Pd, Galang Pratama, Faza Fauzia, dan Pihak Dinas Sosial Kota Jambi yang menyebutkan bahwa bahwa Program Sekolah Rakyat di Kota Jambi telah memberikan dampak positif terhadap

siswa. Sebagian besar siswa yang sebelumnya tidak bersekolah kini dapat belajar lebih teratur, menunjukkan peningkatan pemahaman materi, serta kedisiplinan yang lebih baik. Namun demikian, hasil belajar siswa belum sepenuhnya merata. Sebagian siswa telah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, sementara sebagian lainnya masih mengalami kesulitan, terutama pada materi yang lebih kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan awal siswa, proses adaptasi terhadap program yang masih baru, serta keterbatasan fasilitas pembelajaran dan sarana ekstrakurikuler.

#### **D. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kota Jambi telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu seperti yang tertuang pada Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Program ini berhasil menciptakan proses belajar yang lebih terarah, disiplin, serta memberikan

kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan akademik dan karakter. Selanjutnya,

Program Sekolah Rakyat di Kota Jambi tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya, baik faktor pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program ini antara lain adanya dukungan dari pemerintah daerah dan dinas terkait yang berperan dalam penyediaan fasilitas serta kebijakan pelaksanaan program. Selain itu, ketersediaan tenaga pendidik yang berkomitmen, dukungan lingkungan sekolah, serta partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang membantu keberlangsungan program. Semangat dan motivasi belajar peserta didik yang cukup tinggi juga turut memberikan dampak positif terhadap keberhasilan proses pendidikan. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu kendala utama yang memengaruhi optimalisasi kegiatan pembelajaran, terutama dalam

kegiatan praktik dan ekstrakurikuler. Selain itu, jumlah tenaga pendidik yang masih terbatas serta belum meratanya kompetensi pengajar juga menjadi hambatan dalam proses pembelajaran yang optimal. Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga berdampak pada keberlanjutan pendidikan anak. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan cukup baik, masih diperlukan penguatan dan perbaikan agar pelaksanaannya dapat lebih optimal dan menjangkau lebih banyak sasaran.

Dengan demikian, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program melalui penguatan sarana dan prasarana, penyesuaian metode pembelajaran, pendampingan adaptasi peserta didik, serta peningkatan keterlibatan orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

Ananda, R. S. (2025, Februari 4). Kemensos jajaki pendirian Sekolah Rakyat di Bekasi. [https://kemensos.go.id/berita-](https://kemensos.go.id/berita-terkini/wakil-menteri-sosial-1/Kemensos-Jajaki-Pendirian-Sekolah-Rakyat-di-Bekasi)

[terkini/wakil-menteri-sosial-1/Kemensos-Jajaki-Pendirian-Sekolah-Rakyat-di-Bekasi](https://kemensos.go.id/berita-terkini/wakil-menteri-sosial-1/Kemensos-Jajaki-Pendirian-Sekolah-Rakyat-di-Bekasi)

- Eka Budiono, (2025), Kemensos: Sekolah Rakyat Bertujuan Mulia. <https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9791/kemensos-sekolah-rakyat-bertujuan-mulia?lang=1>
- Haki, Ubay, Eka Danik Prahastiwi, Nikmah Sari Hasibuan, Universitas Bina Bangsa, Universitas Tapanuli Selatan, and Article Info. 2024. "Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif." : 1–19.
- Hidayat, Cece. 2022. *Manajemen Mutu Pendidikan, Konsep, Teori, Dan Implementasi*.
- Palguna. 2023. "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional." 30(2): 350–70. doi:10.20885/iustum.vol30.iss2.art6.
- Septiana. 2024. "Upaya Dalam Pemerataan Pendidikan Di Daerah Terpencil." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Volume. 2, Nomor. 6, Tahun 2024* 1.
- Sugiyono. 2023. "Metode Penelitian Kualitatif."
- Sumarno. 2025. "Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Dunia Pendidikan." *Seminar Nasional Sistem Informasi 2025, 27 Agustus 2025 Fakultas Teknologi Informasi – UNMER Malang KEBIJAKAN: 5508–14.*